

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangka sudah menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Hal ini didukung dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bangka Belitung untuk tahun anggaran 2017, sebagaimana yang peneliti dapatkan dilapangan..
2. Pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka sudah siap mengimplementasikan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI. Hal ini didukung dengan adanya pelatihan diklat sebelum dan saat diterapkannya SAP berbasis AkruaI di BPKAD Kabupaten Bangka, juga didukung dengan sistem aplikasi SIMDA BPKP yang memudahkan pegawai dalam menyusun laporan keuangan.
3. Pada periode 2016-2017 ada perubahan kebijakan dalam laporan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka. Dikarenakan pada periode anggaran tahun 2017 pos-pos pendapatan BPKAD Kabupaten Bangka dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

(BP2RD) sehingga laporan keuangan di BPKAD hanya mencatat beban dan belanja daerah, lalu pada tahun anggaran 2018 Pemerintah Daerah menetapkan kembali BPKAD Kabupaten Bangka untuk mengelola pendapatan pajak daerah namun dalam ruang lingkup seputaran aset daerah Kabupaten Bangka.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penelitian ini terdapat banyak keterbatasan yang disebabkan oleh keterbatasan penulis. Walaupun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan penelitian ini, akan tetapi masih terdapat keterbatasan yang tidak dapat penulis hindari:

1. Penelitian ini hanya mengevaluasi Standar Akuntansi Berbasis Akrua, sehingga penulis hanya terfokus kepada penerapan SAP Akrua pada BPKAD Kabupaten Bangka saja.
2. Data yang tersedia kurang lengkap atau tidak tercatat pada dokumen, hal ini dikarenakan adanya pemindahan tugas karyawan dari suatu tempat ke tempat yang lain.
3. Data yang diperoleh hanya didapat melalui dokumen serta wawancara dengan pegawai instansi pemerintahan yang penulis kunjungi.

## **5.3 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, ada beberapa hal yang dapat dijadikan masukan sebagai bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian dengan topik yang sama. Berikut saran penulis:

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penambahan objek penelitian dengan meneliti lebih dari satu dinas atau SKPD.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah informan wawancara apabila menggunakan teknik yang sama dengan penelitian ini.
3. Peneliti selanjutnya disarankan apabila menggunakan BPKAD Kabupaten Bangka kembali sebagai objek penelitian untuk diharapkan menambah variabel penelitian, agar hasil penelitian nantinya dapat digunakan sebagai pembanding dengan penelitian ini untuk penilaian penerapan SAP berbasis aktual.

